

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan sapi potong untuk Provinsi Sumatera Barat hingga saat ini masih dipenuhi dengan mendatangkan ternak dari luar daerah seperti Sumatra Utara dan Lampung. Program pengembangan sapi potong saat ini belum dapat menjadikan daerah ini sebagai daerah swasembada. Struktur industri peternakan di Sumatera Barat sebagian besar masih bertahan pada skala usaha rakyat. Ciri-ciri usaha rakyat yaitu tingkat pendidikan peternak rendah, pendapatan rendah, penerapan manajemen dan teknologi konvensional, lokasi ternak menyebar, ukuran usaha relatif sangat kecil, modal terbatas, dan pengadaan input utama yaitu hijauan makanan ternak bergantung pada musim dan alam, ketersediaan tenaga kerja keluarga, penguasaan lahan terbatas, dan sebagian besar bergantung pada impor. Pola manajemen usaha yang tradisional ini cenderung menjadi tidak efektif dan juga tidak efisien. Peternak kurang menargetkan produktivitas ternak sapi yang mau dicapai dan kurang memperhitungkan input dan output usaha ternaknya.

Namun untuk dapat melakukan peningkatan produksi diperlukan sumberdaya yang tidak sedikit, mulai dari sumberdaya alam yang harus selalu tersedia sebagai sumber pakan bagi ternak, sumberdaya manusia yang memadai agar dapat meningkatkan produktivitas dengan kemampuan memelihara ternak sapi agar dapat berproduksi dengan optimal dan bermutu. Sumberdaya modal yang memang menjadi kendala terbesar peternak dalam meningkatkan skala usahanya. Karena rata-

rata peternak sapi di Sumatera Barat merupakan peternak kecil dengan skala kepemilikan hanya 2 sampai 5 ekor per rumah tangga peternak.

Upaya yang sering dilakukan masyarakat pedesaan Indonesia termasuk masyarakat Sumatera Barat dalam mengatasi kekurangan modal adalah dengan melakukan kemitraan dengan para pemilik modal di pedesaan juga. Pola kemitraan yang banyak dianut di Indonesia termasuk di Sumatera Barat adalah sistem bagi hasil mempunyai istilah berbeda padat tempat yang berbeda. Di Jawa Timur dikenal dengan gaduhan, di Jawa Barat dikenal dengan paruhan, di Sulawesi dikenal dengan nama tengseng dan di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat dikenal dengan perseduaan, tatacaranya juga berbeda disetiap daerah.

Sistem bagi hasil mengarah kepada kemitraan usaha, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 “Kemitraan usaha adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 “Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan”.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu basis Kawasan Sentra Produksi (KSP) sapi potong di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Tanah Datar 2016 (lampiran 3). Usaha pengembangan sapi potong di daerah ini sebagian besar dilakukan dengan pola kemitraan, yaitu sistem bagi hasil tradisional, bahkan sistem ini masih berjalan hingga sekarang. Sistem bagi hasil yang dalam bahasa daerah dikenal dengan *perseduaan*, terdiri antara peternak

dan pemilik modal yang saling bekerjasama dengan tujuan dapat memberi keuntungan antara kedua belah pihak, biasanya pemilik modal menyerahkan modal berupa uang atau ternak sapi kepada peternak dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

Kecamatan Sungai Tarab merupakan satu dari empat belas Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar dengan luas wilayah 12,96 km² dengan populasi sapi potong kelima terbesar di Kabupaten Tanah Datar yaitu 2.551 ekor sapi (lampiran 2). Dengan rata-rata pemeliharaan sapi hanya 1 sampai 3 ekor saja. Berbagai alasan yang dikemukakan masyarakat pada survey awal kepada penulis terkait kurangnya peran pemerintah dalam agribisnis peternakan baik dalam pemberian wawasan kepada peternak melalui penyuluhan atau sosialisai dan bantuan modal, oleh karena itu masyarakat sebagian besar hanya memelihara sapi orang lain dengan konsep perseduaan.

Perseduaan yang dilakukan didaerah biasanya dilakukan oleh pemodal dan peternak yang memiliki hubungan kekeluargaan antara pemodal dengan peternak, jadi selain keuntungan perseduaan ini juga dapat mempererat hubungan kekeluargaan. Jika dilihat dari penerapan teknik panca usaha peternakan dalam menjalankan perseduaan ini peternak masih sederhana seperti pakan yang diberikan hanya rumput saja tidak ada pakan tambahan lainnya dan pemberian obat-obatan dan vitamin masih dalam sebahagian kecil peternak yang melakukannya, meskipun perseduaan ternak yang dilakukan di Kecamatan Sungai Tarab bukan sebagai pekerjaan utama yang dilakukan peternak, yang mana sebahagian besar peternak perseduaan ini berprofesi sebagai petani. Perseduaan seperti ini tidak melihat

karakteristik peternak bisa dipercaya atau tidak, pengetahuan dan pengelolaan peternak juga tidak dipertimbangkan dan tidak ada perjanjian tertulis antar pelaku, karena pada umumnya pemodal hanya bersifat membantu.

Pengetahuan yang dimiliki peternak di daerah ini hanya diperoleh secara turun temurun dari orang tua mereka dan pengetahuan dari penyuluh pertanian yang bertugas di daerah Kecamatan Sungai Tarab. Penyuluh setiap bulan memberikan pendampingan dengan memberikan penyuluhan tentang beternak sapi, biasanya penyuluh datang bersama inseminator yang biasa melayani peternak untuk melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak sapi yang dipeliharanya.

Peternakan sapi yang dilakukan di daerah ini pada umumnya dilakukan secara tradisional, meskipun memiliki kandang, sapi yang dipelihara lebih banyak berada diluar kandang, mereka jarang memberkan pakan dikandang melainkan lebih banyak mengembalakan dipersawahan dan kebun-kebun masyarakat, sapi jarang dimandikan, pemberian kosentrat hampir tidak pernah. Kondisi seperti ini menyebabkan sapi tidak memproduksi secara optimal, jarak kelahiran (*calving interval*) tinggi dan pada akhirnya dijual dengan harga yang rendah.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu untuk melihat adakah pengaruh karakteristik peternak, pendampingan penyuluh yang dilakukan pemerintah dan penerapan panca usaha peternakan terhadap efektivitas usaha peternakan dan berapakah pendapatan peternak dari perseduaan yang dilakukan sehingga dapat dilihat kontribusi pendapatan perseduaan ini terhadap pendapatan total rumah tangga peternak.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh karakteristik peternak, pendampingan penyuluh dan penerapan teknik panca usaha peternakan terhadap efektivitas kemitraan usaha ternak sapi potong pelaku perseduaan di Kecamatan Sungai Tarab?
2. Bagaimanakah tingkat pendapatan peternak sapi potong pelaku perseduaan dan kontribusinya terhadap pendapatan total rumah tangga peternak di Kecamatan Sungai Tarab?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh karakteristik Peternak, teknik panca usaha peternakan sapi potong terhadap efektivitas kemitraan usaha ternak sapi potong pelaku perseduaan di Kecamatan Sungai Tarab.
2. Mengetahui pendapatan peternak sapi potong pelaku perseduaan dan kontribusinya terhadap pendapatan total rumah tangga peternak di Kecamatan Sungai Tarab.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda yaitu manfaat akademik, praktis dan kebijakan, adalah sebagai berikut:

1. Pada aspek manfaat akademik, hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap khasanah pengembangan ilmu sosial ekonomi pertanian, wawasan

bagi peneliti dan bahan pertimbangan untuk penelitian yang sejenis tentang kemitraan usaha ternak sapi potong.

2. Pada aspek manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi Peternak dan pemodal untuk memperbaiki kapasitasnya, dan teknik panca usaha peternakan sapi sehingga kemitraan usaha ternak sapi lebih menguntungkan kedua belah pihak.
3. Pada aspek manfaat kebijakan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan pemberdayaan ekonomi Peternak dan pengembangan kemitraan usaha ternak sapi potong yang efektif.

